

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR NTB (Perseroda)

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665385-2-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600374-31012024154328

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bpr_ntb_mataram@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-31 15:43:28



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jln. Adi Sucipto-Kebon Roek Ampenan-Kota Mataram-NTB

Nomor Telepon : 0370-641875

Penjelasan Umum : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan ketentuan pelaksanaannya yang diatur pada SE OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diubah dengan SE OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini berisi tentang pelaksanaan Tata Kelola pada PT BPR NTB (Perseroda) yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ketut Sudharmana, S.P	Direktur Utama	Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama secara, antara lain : 1). Mengelola BPR NTB sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; 2). Menerapkan tata kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR NTB dan peraturan perundang-undangan; 3). Menindaklanjuti temuan audit intern dan rekomendasi perbaikan dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 4). Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5). Memimpin, mengarahkan, mengkoordinir dan mengevaluasi seluruh unit kerja BPR NTB untuk dapat menciptakan efektifitas, produktifitas yang tinggi, pertumbuhan usaha yang sehat, profitabilitas yang optimal dan tercapainya target dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB); 6). Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis tahunan dan anggaran BPR NTB kepada pemegang saham; 7). Mengelola BPR NTB dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan/ transparansi, akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan, independen, dan memenuhi kewajiban; 8). Memantau dan menjaga kepatuhan BPR NTB terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR NTB kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain komitmen dalam action plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan terhadap hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan penerapan Program APU PPT dan PPPSPM; 9). Memantau pertumbuhan dan perkembangan BPR NTB dan mencari alternatif solusi jika terjadi kendala dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tersebut di atas; 10). Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai Direksi kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	H. Usman, S.H., M.H	Direktur	Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional secara umum, antara lain : 1). Memimpin dan mengarahkan kebijakan SDM di bawah koordinasi bidang Operasional, termasuk mengusulkan rekrutment, promosi, mutasi/rotasi, pembinaan dan pelatihan; 2). Merencanakan, mengelola dan mengembangkan Akuntansi, Teknologi Informasi, Logistik, Pengadaan Barang Jasa dan SDM untuk kelancaran operasional BPR NTB dan memastikan bahwa BPR NTB membuat Kebijakan secara Corporate (SOP); 3). Pengendalian Anggaran dan Biaya BPR NTB sehingga seluruh biaya termonitor dengan baik dan efisien serta tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan; 4). Memastikan data laporan yang wajib disampaikan kepada OJK dan pihak eksternal lainnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengupayakan penyampaian laporan tersebut tepat waktu; 5). Memastikan kewajiban kepada Pihak ketiga seperti Pajak, BPJS, OJK, Premi Asuransi dan lain-lain telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu; 6). Penanggung jawab pada kebijakan dan prosedur operasional BPR NTB meliputi Akuntansi dan pelaporan, Teknologi Informatika, Logistik, Pengadaan Barang Jasa dan SDM; 7). Bertanggung jawab atas seluruh prosedur serta kelengkapan system dan pengamanan terhadap operasional BPR NTB; 8). Bertanggung jawab atas segala laporan yang berkaitan dengan bidang operasional dan menindaklanjuti hasil temuan audit yang berkaitan dengan bidang tugasnya; 9). Bertanggung jawab atas pengangkatan, penetapan jabatan, perhitungan tarif gaji/upah dan pembayarannya, penetapan kesejahteraan pegawai, promosi dan penurunan pangkat, mutasi pegawai, dan pemberhentian seluruh pegawai; 10). Memutuskan pengadaan barang dan jasa perusahaan; 11). Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi perbaikan dari auditor intern BPR NTB, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau auditor ekstern lainnya sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	Direktur	Tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis secara umum, antara lain : 1). Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan BPR NTB di Bidang Kredit, Dana dan Literasi; 2). Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengevaluasi pengelolaan bisnis BPR NTB di Bidang Kredit, Dana dan Literasi dengan mengoptimalkan kinerja seluruh SDM BPR NTB untuk tercapainya efektifitas kerja, produktifitas yang tinggi, pertumbuhan dana dan kredit yang sehat ,profitabilitas yang optimal serta target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank; 3). Membuat, mengevaluasi serta mensosialisasikan kebijakan dan strategi bisnis BPR NTB bidang dana, kredit dan treasury serta menjalin kerjasama dengan para stakeholder dalam upaya pengembangan bisnis BPR NTB; 4). Memastikan kegiatan Kredit, Dana dan Literasi pada seluruh unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya telah berpedoman pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank dan ketentuan ekstern lainnya yang berlaku; 5). Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasi pengembangan serta penawaran produk-produk Kredit, Dana dan Literasi yang terbaik dan meningkatkan Service Excellence; 6). Mengatur dan mengelola likuiditas dan memastikan BPR NTB dalam kondisi likuid dimana dana selalu tersedia untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga, memenuhi kebutuhan operasional bank termasuk pencairan kredit dan pengeluaran biaya operasional BPR NTB; 7). Memantau pengelolaan, perkembangan dan pertumbuhan kredit dan kolektibilitas kredit Bank untuk tercapainya NPL dalam batas wajar; 8). Menyusun Rencana Bisnis Bank bidang dana, kredit termasuk penanganan kredit bermasalah dan treasury serta mengevaluasi realisasi pencapaiannya setiap saat; 9). Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi perbaikan dari auditor intern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau auditor ekstern lainnya sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
4	Zulkifli Hamdani, S.E	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara umum, antara lain : 1). Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR NTB telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; 2). Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR NTB tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 3). Memantau dan menjaga kepatuhan BPR NTB terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR NTB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; 4). Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 5). Mencegah Direksi BPR NTB agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 6). Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR NTB; 7). Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR NTB; 8). Memastikan seluruh organ BPR NTB telah bekerja sesuai ketentuan dan mematuhi prosedur yang berlaku, baik ketentuan perundang-undangan atau peraturan internal BPR NTB; 9). Memastikan kebenaran laporan keuangan BPR NTB yang meliputi laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, laporan tahunan, laporan publikasi dan laporan lainnya yang wajib disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan; 10). Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi perbaikan dari auditor intern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau auditor ekstern lainnya sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; 11). Mencegah Direksi BPR NTB untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Beberapa rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti diantaranya terhadap : Direksi telah melakukan perbaikan terhadap draft PKPB yang disesuaikan dengan penasihatan Komisaris dan PKPB telah diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2023 SK Nomor 33 Tahun 2023, telah meningkatkan kapasitas dan kemampuan auditor dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi Auditor, melakukan evaluasi terhadap auditor di Kantor Cabang dan terhadap Pegawai yang tersangkut fraud diberhentikan dengan tidak hormat. Direksi telah menindaklanjuti pensihatan Dewan Komisaris dengan melakukan penguatan pengendalian internal salah satunya dengan membuat kebijakan khusus tentang anti fraud yang ditetapkan melalui SK nomor 36 tahun 2023. Direksi telah melakukan pemantauan likuiditas secara rutin setiap Kantor Cabang, melakukan pemantauan terhadap rekening Deposito yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat, memperluas jaringan kerjasama dengan mitra BPR NTB dalam penempatan dana, melakukan pembinaan terhadap Kantor Cabang yang memiliki Cash Ratio di bawah 5%, memberikan himbauan kepada Cabang-Cabang agar seluruh pegawai yang bertugas sebagai marketing penghimpunan dana dan memberikan usulan pemberian insentif untuk penghimpunan deposito, melakukan efisiensi biaya dengan meminimalisir biaya-biaya yang tidak mendesak serta melaporkan secara mingguan hasil evaluasi likuiditas kepada Dewan Komisaris. Direksi telah melakukan perbaikan draft Struktur Organisasi seperti mencatumkan Komite Manajemen Risiko, menambahkan garis komando dan garis koordinasi antara Komite Audit dengan SKAI dan garis komando dan garis koordinasi Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta telah menerbitkan Struktur Organisasi melalui SK Direksi Nomor 96 Tahun 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi telah melakukan assessment terhadap tenaga profesional. Direksi telah memerintah SKAI untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan terhadap Pegawai yang tersangkut fraud diberhentikan dengan tidak hormat dan terus melakukan kontrol terhadap penyelesaian penggantian kerugian. Direksi telah melakukan perpanjangan kontrak kerja Anggota Komite atas nama M. Raihan Mubaraq. Direksi telah melakukan perbaikan dan penambahan referensi dalam pedoman Audit serta mengajukan kembali kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan. Terhadap komposisi dan persyaratan jabatan telah ditindaklanjuti oleh Direksi dengan menginventarisir seluruh data-data Pegawai yang mencakup masa kerja, pendidikan terakhir, sertifikasi kompetensi, keahlian dan kemampuan serta tidak memiliki hubungan kekerabatan. Selain itu Direksi juga secara bertahap telah mengikutsertakan pegawai yang menduduki jabatan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi Pejabat Eksekutif serta melakukan mutasi untuk mengisi posisi jabatan yang kosong. Penasihat Dekom terhadap Asuransi CAR di Kabupaten Sumbawa, Direksi telah menindaklanjuti dengan menyampaikan penjelasan melalui surat dan melalui pertemuan langsung dengan Pegawai-pegawai yang ada di kabupaten Sumbawa serta melakukan pemeriksaan yang mendalam oleh SKAI dan pembuatan kajian oleh Direktur Kepatuhan dari sisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si.	Komisaris Utama	Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam Job Description BPR NTB : 1). Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2). Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3). Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4). Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR NTB. 5). Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR NTB, kecuali terkait dengan : a). penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR; dan b). hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6). Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya. 7). Dewan Komisaris wajib memberitahukan : a). pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b). keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. 8). Melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko BPR NTB secara efektif; 9). Memberikan pendapat dan menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan oleh Direksi dan mengawasi pelaksanaannya; 10). Mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPR NTB apakah telah sesuai ketentuan yang ditetapkan BPR NTB dan ketentuan ekstern lainnya yang berlaku terkait operasional BPR NTB; 11). Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Syarif Mustaan, S.E	Komisaris	Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam Job Description BPR NTB : 1). Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2). Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3). Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4). Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR NTB. 5). Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR NTB, kecuali terkait dengan : a). penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR; dan b). hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6). Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya. 7). Dewan Komisaris wajib memberitahukan : a). pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b). keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. 8). Melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko BPR NTB secara efektif; 9). Memberikan pendapat dan menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan oleh Direksi dan mengawasi pelaksanaannya; 10). Mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPR NTB apakah telah sesuai ketentuan yang ditetapkan BPR NTB dan ketentuan ekstern lainnya yang berlaku terkait operasional BPR NTB; 11). Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Ria Prayuniarti, S.P	Komisaris dan Independen	Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam Job Description BPR NTB : 1). Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2). Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3). Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4). Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR NTB. 5). Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR NTB, kecuali terkait dengan : a). penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR; dan b). hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6). Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya. 7). Dewan Komisaris wajib memberitahukan : a). pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b). keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. 8). Melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko BPR NTB secara efektif; 9). Memberikan pendapat dan menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan oleh Direksi dan mengawasi pelaksanaannya; 10). Mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPR NTB apakah telah sesuai ketentuan yang ditetapkan BPR NTB dan ketentuan ekstern lainnya yang berlaku terkait operasional BPR NTB; 11). Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala.

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi kepada Direksi, antara Lain : Rekomendasi kepada Direksi, antara Lain : 1). Dewan Komisaris memberikan penasehatan untuk tetap menerapkan tata kelola yang baik di lingkungan PT. BPR NTB (Perseroda) secara optimal dengan memenuhi nilai-nilai Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness pada seluruh tingkatan atau jenjang struktur yang ada di PT. BPR NTB (Perseroda). 2). Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas bisnis Bank terutama dalam penyaluran kredit dengan meningkatkan kualitas aspek analisa proses pencairan kredit. 3). Dewan Komisaris memberikan pertimbangan agar melakukan refreshment pada Satuan Kerja Audit Intern agar dalam penerapannya dapat terlaksana dengan baik, selain itu sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya fraud dengan adanya pelaksanaan tugas yang optimal. 4). Dewan Komisaris mengarahkan agar peningkatan kualitas SDM dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung seluruh aktivitas bisnis dan operasional Bank. 5). Dewan Komisaris telah memberikan penasehatan agar jajaran Direksi segera menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari SKAI terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil Pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 6). Terkait masih adanya komitmen terhadap hasil pemeriksaan ekstern maupun intern yang belum selesai agar tetap menjadi perhatian Direksi untuk segera ditindaklanjuti. 7). Kelengkapan Anggota Dewan Komisaris yang belum terpenuhi serta Anggota Komite Pemantau Risiko yang belum terisi, sehingga dapat menjadi perhatian bersama dengan Direksi. 8). Upaya penurunan NPL dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan dan memaksimalkan kerja dari Divisi Penyelamatan Kredit beserta Tim Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

9). Realisasi kredit yang tidak diimbangi dengan posisi outstanding kredit agar menjadi perhatian Direksi agar tidak menggerus nilai outstanding. 10). Direksi perlu memaksimalkan produk unggulan yang dimiliki BPR baik untuk kredit maupun simpanan. 11). Dewan Komisaris memberikan penasihatan agar penerapan manajemen risiko dapat dipahami oleh semua jajaran dan lini di PT. BPR NTB (Perseroda). 12). Dewan Komisaris memberikan penasihatan agar usulan hapus buku disertai dengan analisa yang memadai. 13). Dewan Komisaris telah memberikan penasihatan terhadap Rencana Bisnis Bank diantaranya dengan tetap memperhatikan visi dan misi yang dimiliki oleh BPR. 14). Dewan Komisaris rutin mengadakan rapat bersama Direksi sebagai upaya Pengawasan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja masing-masing Direktorat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Komite Audit	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit : 1). Dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. 2). Dalam rangka melaksanakan tugas, untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a). Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b). Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit; c). Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR; d). Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, Akuntan Publik dan hasil Pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lain. 3). Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 4). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
2	Komite Pemantau Risiko	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko : 1). Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; 2). Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko paling sedikit melakukan : a). Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; b). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi : 1). Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara independen; 2). Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit mencakup : a). Evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; dan b). Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi; 3). Dalam rangka melakukan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a). Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; b). Prestasi kerja individual; c). Kewajaran dengan peer group; dan d). Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR.
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)		
Tidak ada		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Ria Prayuniarti, SP	Keuangan	Ketua	Ketua	Anggota	Ya
2	Syarif Mustan, SE	Keuangan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak
3	M. Raihan Mubaraq, SE., MA	Keuangan	Anggota	Anggota	Tidak Menjabat	Ya
4	Moh. Zuhrol Fata	Manajemen Operasional	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	1). Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindaklanjut hasil audit. 2). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, terhadap : a). Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern b). Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit c). Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR d). Pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil Pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas lain 3). Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Semua program telah terlaksana	3
2	Komite Pemantau Risiko	1). Membantu melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi yang mencakup : a). Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi b). Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. c). Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem informasi manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan, stratejik, dan reputasi. d). Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 2). Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite pemantau risiko serta satuan kerja manajemen risiko untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. 3). Mengevaluasi laporan profil risiko BPR dengan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi BPR serta usulan langkah-langkah untuk melakukan mitigasi atas risiko tersebut, sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah-langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan. 4). Memantau dan mengevaluasi Satuan Kerja Kepatuhan BPR sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh Perjanjian dan Komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak-pihak terkait lainnya. 5). Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi risiko dan kepatuhan.	Semua program telah terlaksana	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	1). Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang : a). Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi; b). Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; c). Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi anggota Komite Dewan Komisaris; d). Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. 2). Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 3). Komite Remunerasi dan Nominasi membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kompensasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Dewan Komisaris setelah pengangkatan mereka secara periodik; 4). Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;	Semua program telah terlaksana	2

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada Kepemilikan saham anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Zulkifli Hamdani, S.E	Zulkifli Hamdani, S.E	tidak ada	tidak ada
2	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	tidak ada	tidak ada
3	H. Usman, S.H., M.H	H. Usman, S.H., M.H	tidak ada	tidak ada
4	Ketut Sudharmana, S.P	Ketut Sudharmana, S.P	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keuangan baik sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ketut Sudharmana, S.P	Ketut Sudharmana, S.P	tidak ada	tidak ada
2	H. Usman, S.H., M.H	H. Usman, S.H., M.H	tidak ada	tidak ada
3	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	tidak ada	tidak ada
4	Zulkifli Hamdani, S.E	Zulkifli Hamdani, S.E	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keluarga baik sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si.	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si.	tidak ada	tidak ada
2	Syarif Mustaan, S.E	Syarif Mustaan, S.E	tidak ada	tidak ada
3	Ria Prayuniarti, S.P	Ria Prayuniarti, S.P	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keuangan baik sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si.	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si.	tidak ada	tidak ada
2	Syarif Mustaan, S.E	Syarif Mustaan, S.E	tidak ada	tidak ada
3	Ria Prayuniarti, S.P	Ria Prayuniarti, S.P	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keluarga baik sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	4	439384550	3	511434234
2	Tunjangan	4	1122723892	0	0
3	Tantiem	9	182775629	7	47584128
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	4	74800000	0	0
	Total		1819684071		559018362

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang diterima di tahun 2023, antara lain: 1). Jumlah gaji adalah merupakan jumlah gaji pokok untuk Direksi dan jumlah honor yang diterima oleh Dewan Komisaris. 2). Jumlah Tunjangan adalah merupakan Tunjangan Istri/Suami dan Anak, tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kinerja untuk Direksi. 3). Jumlah Tantiem adalah merupakan jumlah tantiem yang diterima oleh Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR NTB se NTB sebelum penggabungan ke PD. BPR NTB Mataram yaitu sebanyak 11 orang yang dihitung mulai bulan Januari - Maret 2022 yang dibagi tahun 2023. 3). Jumlah Remunerasi Lainnya adalah merupakan Tunjangan Perumahan Direksi untuk tahun buku 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Ganti biaya sewa rumah	0
2	Transportasi	Masing-masing 1 unit Mobil Dinas	0
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	0
4	Fasilitas lainnya	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Masing-masing Direksi menerima fasilitas 1 (satu) unit Mobil Dinas, pengganti biaya sewa rumah dan fasilitas kesehatan dengan ikut dalam program BPJS Kesehatan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6,29	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,28	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,86	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio gaji tertinggi dan terendah secara keseluruhan yang diterima secara tunai oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	02-01-2023	3	Penanganan Benturan Kepentingan
2	09-01-2023	3	Perkembangan kasus Fraud atas nama Mawardi
3	13-01-2023	3	1). Pembahasan revisi dan penyempurnaan RBB 2023. 2). Komitmen dari temuan OJK yang belum terpenuhi
4	27-01-2023	3	Benturan Kepentingan yang berada di Media Massa
5	03-02-2023	3	Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB)
6	13-02-2023	3	Tindak Lanjut atas LHP Khusus KC. Labuhan Sumbawa
7	24-02-2023	3	Laporan Dewan Komisaris dalam Laporan Tata Kelola tahun 2022
8	27-02-2023	3	Likuiditas PD. BPR NTB
9	10-03-2023	3	Struktur Organisasi PD. BPR NTB
10	08-05-2023	3	Tenaga Kontrak Profesional PD. BPR NTB
11	10-05-2023	3	Fasilitas Pengurus PD. BPR NTB
12	11-05-2023	3	Tindak Lanjut atas LHP Khusus KC. Labuapi
13	06-06-2023	3	1). Tindaklanjuti dari Radirkom. 2). Tindaklanjuti dari LHP Khusus An. DS dan ERC
14	20-06-2023	3	Evaluasi Penggunaan Jasa KAP tahun buku 2022
15	03-07-2023	3	Perpanjangan Kontrak Anggota Komite
16	06-07-2023	3	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KPNO dan POKP
17	07-07-2023	3	1). PKPT Satuan Kerja Manajemen Risiko. 2). PKPT SKAI. 3). Dana CSR dan Pembinaan
18	13-07-2023	3	1). Pedoman Standar Pelaksanaan Audit Intern. 2). Pedoman Manajemen Risiko
19	24-08-2023	3	Persetujuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
20	25-08-2023	3	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KC. Praya
21	26-09-2023	3	1). Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2023. 2). Uraian Tugas dan tanggungjawab bagi Pengurus
22	09-10-2023	3	Evaluasi Kinerja Bulan September 2023
23	18-10-2023	3	1). Pihak Independen sebagai Anggota Komite dari Dewan Komisaris. 2). Data SDM PT. BPR NTB (Perseroda)
24	06-11-2023	3	Komposisi dan Persyaratan Jabatan di Lingkungan PT. BPR NTB (Perseroda)
25	13-11-2023	3	Asuransi CAR
26	04-12-2023	3	Penunjukan KAP
27	06-12-2023	3	Telaah RKA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 27 kali rapat internal bersama Anggota Dewan Komisaris lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si.	27	0	100,00
2	Syarif Mustaan, S.E	27	0	100,00
3	Ria Prayuniarti, S.P	27	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat hanya dilakukan dengan kehadiran fisik dengan tingkat kehadiran masing-masing Anggota Dewan Komisaris 100%.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	4	2	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	2	2	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat penyimpangan / kecurangan Internal Bank oleh Dewan Komisaris dan Direksi namun terdapat penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pada tahun 2023.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	1
Dalam Proses Penyelesaian	1	2
Total	2	3

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terdapat 2 (dua) kasus permasalahan hukum yang telah selesai (mempunyai hukum yang tetap)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230125	Kegiatan Sosial	Untuk Pengadaan Peralatan Tanding Atlit Panahan Pada PORPROV 2023	Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Kota Mataram	5.000.000
2	20230130	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Darul Hikmah Dusun Koda Permai Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa	Panitia pembangunan masjid Darul Hikmah	10.000.000
3	20230215	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Musholla Nurul Hidayah Karang Bongkot Perampuan Kab Lombok Barat	Panitia Pengembangan Musholla Nurul Hidayah	5.000.000
4	20230216	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Cabang Olahraga Shorinji Kempo Untuk Kegiatan PORPROV XI NTB 2023	Pengurus Shorinji Kempo NTB	5.000.000
5	20230216	Kegiatan Sosial	Sumbangan Untuk Masyarakat Yang Terkena Banjir Kabupaten Sumbawa Barat	Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang terkena dampak banjir	10.000.000
6	20230313	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Untuk Kegiatan Mukhtar Pemikiran Mahasantri Nahdlatul Wathan Se Indonesia	Panitia Kegiatan Mukhtar Pemikiran Mahasantri Nahdlatul Wathan	10.000.000
7	20230313	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Untuk Kegiatan STQ XXVII Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2023	Panitia Kegiatan STQ XXVII Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2023	10.000.000
8	20230331	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Untuk TPQ Fauzul Jannah Kelurahan Pejeruk - Ampenan	Pengurus Yayasan TPQ Fauzul Jannah Kelurahan Pejeruk - Ampenan	10.000.000
9	20230414	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Dusun Nyamarai Desa Karang Bongkot Kec.Labuapi Kab.Lombok Barat	Panitia Pembangunan Masjid Al-Muhajirin	7.500.000
10	20230529	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Festival Olah Raga Masyarakat FORNAS VII Jawa Barat KORMI Kabupaten Sumbawa	Pengurus KORMI Kabupaten Sumbawa	15.000.000
11	20230613	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Pagar Batas Asrama Dan Masjid Pondok Pesantren Yadinu Kecamatan Masbagik Kab.Lombok Timur	Yayasan Yadinu Kecamatan Masbagik Kab.Lombok Timur	20.000.000
12	20230615	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI) Kabupaten Sumbawa	Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI) Kabupaten Sumbawa	15.000.000
13	20230711	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pemeliharaan & Rehab Masjid Baitul Hidayah NW Midang	Panitia Pemeliharaan & Rehab Masjid Baitul Hidayah NW Midang	10.000.000
14	20230721	Kegiatan Sosial	Bantuan 100 Sak Semen Untuk Masjid Nurul Iman Dusun Dasan Lekong Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kab.Lombok Tengah	Panitia Pembangunan Masjid Nurul Iman Dusun Dasan Lekong Desa Bujak Kec.Batukliang Kab.Lombok Tengah	7.000.000
15	20230721	Kegiatan Sosial	Bantuan 100 Sak Semen Untuk TPQ An-Nursi Yayasan Bunga Bangsa Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kab.Lombok Tengah	Pengurus Yayasan Bunga Bangsa Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kab.Lombok Tengah	7.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
16	20230731	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pada Program Penebaran Benih Ikan Oleh Forum Wartawan Ekonomi Dan Bisnis	Forum Wartawan Ekonomi Dan Bisnis	10.000.000
17	20230731	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pelatihan Digital Marketing Course Untuk Solidaritas Institute NTB	Pengurus Solidaritas Institute NTB	2.500.000
18	20230731	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pelatihan Dan Pengenalan Jurnalistik Pada Kaum Muda Milenial Untuk Lembo Ade Institut	Pengurus Lembo Ade Institut	2.500.000
19	20230801	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Kesenian Gendang Beleg Mekar Sari Desa Batu Mekar Kab.Lombok Barat	Pengurus Kesenian Gendang Beleg Mekar Sari Desa Batu Mekar Kab.Lombok Barat	5.000.000
20	20230802	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Tradisi Upacara Ngaben Masal Karya Bagya Munggal 2023	Panitia Kegiatan Tradisi Upacara Ngaben Masal Karya Bagya Munggal 2023	10.000.000
21	20230818	Kegiatan Sosial	Bantuan Pemberian Bingkisan Ramadhan Berupa Kain Sarung	Forum Pemuda dan Remaja Kampung (F-Perekam) dan Masjid nurul Huda	20.925.000
22	20230818	Kegiatan Sosial	Bantuan Pemberian Bingkisan Ramadhan Berupa Kain Sarung ke Yayasan Buah Hati Insani	Yayasan Buah Hati Insani	14.968.350
23	20230818	Kegiatan Sosial	Bantuan Pemberian Bingkisan Ramadhan Berupa Kain Sarung ke Kabupaten Lombok Timur	Sekda Kabupaten Lombok Timur	46.500.000
24	20230822	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana CSR Pengadaan Sekretariat Untuk Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah	Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah	25.000.000
25	20230822	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Pesantren Tahfizil Qur'an Nurulhadi International Kecamatan Janapria Kab.Lombok Tengah	Pesantren Tahfizil Qur'an Nurulhadi International Kecamatan Janapria Kab.Lombok Tengah	25.000.000
26	20230822	Kegiatan Sosial	Bantuan dana rehabilitasi berat ruang belajar madrasah tsanawiyah "Hidayatul Arifin"	Madrasah Tسانawiyah "Hidayatul Arifin"	7.900.000
27	20230825	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Hultah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) KE-88	Pengurus Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI)	20.000.000
28	20230825	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Kelompok Tani Nata Pendita Kec.Lenek Kab.Lombok Timur	Kelompok Tani Nata Pendita Kec.Lenek Kab.Lombok Timur	10.000.000
29	20230828	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lansia Posyandu Lansia Kel.Bugis	Posyandu Lansia Kel.Bugis	25.000.000
30	20230915	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Kegiatan Wellness Of Sembalun Kabupaten Lombok Timur	Panitia Kegiatan Wellness Of Sembalun Kabupaten Lombok Timur	15.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
31	20230919	Kegiatan Sosial	Bantuan Semen untuk Pembangunan Mushalla Ponpes Al-Ittihadiyah NW Sepakat Kec.Paya Timur Kabupaten Lombok Tengah	Panitia Pembangunan Mushalla Ponpes Al-Ittihadiyah Nw Sepakat Kec.Paya Timur Kab. Lombok Tengah	6.500.000
32	20230920	Kegiatan Sosial	Bantuan Semen Pembangunan Masjid Baitul Ishlah Dusun Lintek Desa Darmasari Kec.Sikur Kabupaten Lombok Timur	Panitia Pembangunan Masjid Baitul Ishlah Dusun Lintek Desa Darmasari Kec.Sikur Kab. Lombok Timur	6.500.000
33	20230921	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Program "Dari Masjid Untuk Umat" Remaja Masjid Jami Al Mukmin Kelurahan Brang Biji Kab.Sumbawa	Remaja Masjid Jami Al Mukmin Kelurahan Brang Biji Kab.Sumbawa	15.000.000
34	20230926	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pengiriman Atlit Komunitas Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) NTB Pada Kualifikasi Pon XXI 2023	Komunitas Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) NTB	7.500.000
35	20230929	Kegiatan Sosial	Dana Bantuan Dana Kegiatan Maulid Nabi Muhammad Saw 1445 H Remaja Masjid Al Mabruur Kekalik Jaya Sekarbela Mataram	Remaja Masjid Al Mabruur Kekalik Jaya Sekarbela Mataram	3.000.000
36	20231004	Kegiatan Sosial	Dana Bantuan Masjid Darul Mukhlisin Kekalik Jaya Mataram	Masjid Darul Mukhlisin Kekalik Jaya Mataram	3.450.000
37	20231006	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Kegiatan Santunan Anak Yatim Tk Paud Di Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Sikur	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Sikur	5.000.000
38	20231009	Kegiatan Sosial	Bantuan dana Pembangunan Masjid Ittihadul Ummah Dusun Senanggalih Kec. Sambelia Lombok Timur	Panitia Pembangunan Masjid Ittihadul Ummah Dusun Senanggalih Kec. Sambelia Lombok Timur	10.000.000
39	20231010	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Rasabou Kabupaten Dompu	Panitia Pembangunan Masjid Rasabou Kabupaten Dompu	5.000.000
40	20231010	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Kegiatan Pemusatan Pelatihan Daerah Cabor Panjat Tebing 2023	Panitia Kegiatan Pemusatan Pelatihan Daerah Cabor Panjat Tebing 2023	7.500.000
41	20231011	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Rehabilitasi Aula Bale Tahfiz Dan Berdzikir Yayasan Cahaya Mustika Kab.Lombok Tengah	Panitia Rehabilitasi Aula Bale Tahfiz Dan Berdzikir Yayasan Cahaya Mustika	10.000.000
42	20231013	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Kegiatan Bhakti Stunting Kabupaten Lombok Tengah	Masyarakat wilayah Tandek & Jelantik Kabupaten Lombok Tengah	2.580.000
43	20231017	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Kegiatan Turnamen Futsal Se-Kecamatan Bolo Kabupaten Bima	Panitia Turnamen Futsal Se-Kecamatan Bolo Kabupaten Bima	2.000.000
44	20231019	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Zona Literasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTB	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTB	93.998.500
45	20231031	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Operasional TPQ Yayasan Darussalimin Desa Kateng Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah	TPQ Yayasan Darussalimin Desa Kateng Kec. Praya barat Kab. Lombok Tengah	10.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
46	20231031	Kegiatan Sosial	Bantuan Semen untuk Pembangunan Musholla Yayasan Bintang Biru Dusun Waker Desa Santong Kec. Kayangan KLU	Panitia Pembangunan Musholla Yayasan Bintang Biru Dusun Waker Desa Santong Kec. Kayangan KLU	3.350.000
47	20231031	Kegiatan Sosial	Bantuan Semen untuk Pembangunan Masjid Jami atul Fadli Dusun Rongsot Barat Desa Sigar Penjalin Kec. Tanjung KLU	Panitia Pembangunan Masjid Jami atul Fadli Dusun Rongsot Barat Desa Sigar Penjalin Kec. Tanjung KLU	3.350.000
48	20231031	Kegiatan Sosial	Bantuan Semen untuk Forum Pemuda Desa Sokongh Dusun Tuti Desa Sokong Kec. Tanjung KLU	Forum Pemuda Desa Sokongh Dusun Tuti Desa Sokong Kec. Tanjung KLU	6.700.000
49	20231031	Kegiatan Sosial	Bantuan Semen untuk Yayasan Hakam Dusun Gitak Demung Desa Genggeling Kec. Gangga KLU	Yayasan Hakam Dusun Gitak Demung Desa Genggeling Kec. Gangga KLU	3.350.000
50	20231031	Kegiatan Sosial	Bantuan Semen untuk Pembangunan Musholla Darul Takzim Dusun Murpebuan Desa Teniga Kec. Pemenang KLU	Panitia Pembangunan Musholla Darul Takzim Dusun Murpebuan Desa Teniga Kec. Pemenang KLU	3.350.000
51	20231031	Kegiatan Sosial	Bantuan Semen untuk Pembangunan Jalan Dusun Lonang Desa Bentek Kecamatan Gangga KLU	Banjar Lonang Dusun Lonang Desa Bentek Kecamatan Gangga KLU	3.350.000
52	20231031	Kegiatan Sosial	Bantuan Semen untuk Pembangunan Musholla Sunan Giri Desa Manggala Kec. Pemenang KLU	Panitia Pembangunan Musholla Sunan Giri Desa Manggala Kec. Pemenang KLU	3.350.000
53	20231031	Kegiatan Sosial	Bantuan Semen untuk Pembangunan Masjid Al-Imani Dusun Kopong Sebangun Desa Sambik Kec. Gangga KLU	Panitia Pembangunan Masjid Al-Imani Dusun Kopong Sebangun Desa Sambik Kec. Gangga KLU	6.700.000
54	20231113	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Kegiatan Lombok Heritages Tourism 2023	Panitia Lombok Heritages Tourism 2023	5.000.000
55	20231124	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Rehabilitasi Musholla Satpol PP Prov. NTB	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat	5.000.000
56	20231128	Kegiatan Sosial	Bantuan Semen untuk Pembangunan Sarana Yayasan Bayanul Haq Anyar Kec. Bayan KLU	Yayasan Bayanul Haq Anyar Kec. Bayan KLU	6.700.000
57	20231207	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Musholla Al Musta im Kel. Turida Kec. Sandubaya Mataram	Panitia Pembangunan Musholla Al Musta im Kel. Turida Kec. Sandubaya Mataram	5.000.000
58	20231218	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Musholla Jabal Syur Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah	Panitia Pembangunan Musholla Jabal Syur Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah	5.000.000
59	20231218	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Musholla As Shadiqin Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah	Panitia Pembangunan Musholla As Shadiqin Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah	5.000.000
60	20231219	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Kegiatan Fit Camp For Teenegers	PD Salimah Kota Mataram	5.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
61	20231221	Kegiatan Sosial	Bantuan Pengadaan Tandon dalam mendukung Prasarana Pengadaan Air Bersih di wilayah Kuripan Utara	Kantor Desa Kuripan Utara	4.300.000
62	20231227	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Dalam Rangka Kegiatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sumbawa	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	13.300.000
63	20231229	Kegiatan Sosial	Bantuan Pembangunan Musholla Siti Hajar Kelurahan Raba Dompur Timur Kota Bima	Panitia Pembangunan Musholla Siti Hajar Kelurahan Raba Dompur Timur Kota Bima	2.000.000
64	20231229	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru Yayasan Al-Muslimun Bunut Baok Kec.Praya Kab.Lombok Tengah	Pengurus Yayasan Al-Muslimun Bunut Baok Kec.Praya Kab.Lombok Tengah	20.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023 PT BPR NTB (Perseroda) tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Untuk tahun 2023 sebagian besar pemberian bantuan dana untuk kegiatan sosial bersumber dari Dana CSR yang merupakan bagian laba tahun buku 2022.

Nama BPR	: PT BPR NTB (Perseroda)
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jln. Adi Sucipto-Kebon Roek Ampenen-Kota Mataram-NTB
Nomor Telepon	: 0370-641875
Modal Inti BPR	: 250.063.737.693,00
Total Aset BPR	: 1.002.100.044.010,00
Bobot BPR	: D
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	Secara umum BPR NTB memiliki penerapan tata kelola yang baik pada posisi keuangan akhir bulan Desember 2023. Penguatan infrastruktur sedang dilakukan pembenahan baik struktur organisasi maupun SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta kebijakan-kebijakan terkait dengan tata kerja operasional bank. Jumlah Direksi pada BPR NTB telah terpenuhi sebanyak 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang diantaranya adalah Direktur Kepatuhan. Jumlah Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang namun pada bulan Nopember 2022 terdapat 1 (satu) orang Dewan Komisaris meninggal dunia dan sampai saat ini belum ada penggantinya. BPR NTB memiliki Komisaris Independen sebanyak 1 (satu) orang atau kurang dari 50 persen dari jumlah Anggota Dewan Komisaris. BPR NTB telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif dan telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko. BPR NTB belum memiliki ketentuan SOP Audit Intern dan belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFIB) dan kelemahan SOP Audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR NTB belum memiliki program rekrutmen SDM yang melaksanakan fungsi audit intern namun telah melakukan pengembangan SDM yaitu dengan mengikutsertakan dalam Sertifikasi Audit dan pendidikan atau pelatihan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. BPR NTB belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. Direksi telah menyusun RBB dan disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi misi BPR NTB dan BPR NTB telah menyusun Laporan Keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK. Dengan demikian Hasil penilaian Tata Kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian sebagaimana POJK No. 4/POJK.03/2015 hemat kami masuk dalam Predikat Komposit BAIK dengan nilai Komposit 2.04. Dalam penilaian Tingkat Kesehatan masuk dalam Peringkat 2.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,80	0,22	1,52	0.304	Jumlah anggota Direksi telah terpenuhi yaitu sebanyak 4 orang, bertempat tinggal di Kabupaten/Kota yang berbeda namun pada provinsi yang sama, tidak merangkap jabatan pada bank lain, tidak ada hubungan keluarga dengan dengan sesama Direksi dan dengan anggota Dewan Komisaris, telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta tidak memberikan kuasa umum, telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari audit intern, ekstern serta telah menindaklanjuti temuan OJK namun belum secara keseluruhan. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran berkelanjutan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan/pendidikan dalam rangka pengembangan kualitas individu; dan Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,125	0,72	0,40	0,10	1,22	0.153	Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang telah terpenuhi berdasarkan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Nomor 20, namun salah satu anggota Dewan Komisaris Independen telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2022, bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda namun provinsi yang sama, tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Lain. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris, dengan Direksi dan Pemegang Saham. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja, telah memberikan nasihat kepada Direksi, memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dan telah menyediakan waktu untuk menyelenggarakan rapat dengan Direksi. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK dan/atau otoritas lain dengan meminta Direksi menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,025	0,50	0,67	0,10	1,27	0.032	BPR telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko pada saat dilakukan Rapat Evaluasi Kinerja Direksi. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi terkait audit intern dan fungsi Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai BPR, tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan melakukan pemberian sanksi kepada oknum pegawai yang melakukan fraud.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	1,20	0,20	2,40	0.240	Bank telah memiliki Direktur kepatuhan yang tidak merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dana dan penyaluran dana serta bekerja secara independen. Bank telah menunjuk pejabat Satuan Kerja yang menangani Fungsi Kepatuhan dan APU PPT cukup independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional, telah menyusun Pedoman Kerja, sistem, dan Prosedur Kepatuhan serta telah memiliki Job Discription. Direktur Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat BPR kepada OJK namun tindak lanjutnya belum dilakukan dengan maksimal. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan reviu atau penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR namun belum menyeluruh. Belum ada laporan khusus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari Peraturan OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	1,30	0,18	2,48	0.248	BPR telah menunjuk Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung terhadap fungsi Audit Intern, bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. BPR belum memiliki program rekrutmen SDM yang melaksanakan fungsi audit intern namun memiliki program dalam pengembangan SDM yaitu dengan mengikutsertakan dalam sertifikasi audit dan pendidikan/pelatihan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan audit intern dilaksanakan cukup memadai dan cukup independen. Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern tahun buku 2023. BPR belum pernah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK sesuai ketentuan OJK, karena belum pernah dilakukan kaji ulang semenjak dilakukan penggabungan dengan BPR NTB se NTB.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,60	0,20	1,80	0.045	Penugasan audit kepada KAP telah memenuhi aspek legalitas, Pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2022, BPR menunjuk AK/KAP yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS, Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan tepat waktu kepada Bank oleh KAP dan Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup yang diatur oleh OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	1,03	0,25	2,78	0.278	BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif. BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit risiko. BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, Dewan Komisaris telah menyetujui dan telah mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, BPR tidak menyusun laporan produk dan aktifitas baru yang dilaporkan ke OJK karena belum ada produk dan aktifitas baru yang dilakukan atau direncanakan pada Rencana Bisnis.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,00	0,10	2,60	0.195	BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank (PKPB) yang juga mengatur tentang BMPK dan telah dilakukan review serta disahkan dengan Keputusan Direksi. BPR belum mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada OJK. Selama periode tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelanggaran ketentuan BMPK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	1,00	0,20	2,04	0.153	Direksi menyusun RBB tahun 2023 dan setuju Dewan Komisaris sesuai dengan visi misi BPR. Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR RBB disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,90	0,20	2,60	0.195	BPR dalam menyusun Laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tahunan disusun sesuai ketentuan OJK. Telah melaksanakan transparansi dan penggunaan data nasabah dengan berpedoman sesuai ketentuan OJK. BPR telah menyusun dan melaporkan Laporan bulanan namun masih terdapat kesalahan sesuai Hasil pemeriksaan umum OJK posisi April 2023. Laporan Tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direktur Utama, disampaikan secara lengkap dan tepat waktu dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK. Laporan pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan secara tepat waktu dan pelayanan pengaduan diadministrasikan dengan baik.
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR NTB (PERSERODA) TAHUN BUKU 2023

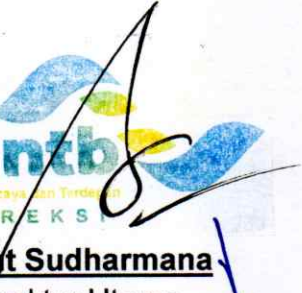
Dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR NTB (Perseroda) menyetujui Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun Buku 2023 untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Mataram, 30 Januari 2024

PT. BPR NTB (Perseroda)

Menyetujui dan Mengesahkan :


Lalu Nofian Hadi Saputra
Komisaris Utama


Ketut Sudharmana
Direktur Utama

BAB IV KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Nama : PT BPR NTB (Perseroda)

Posisi : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,04	BAIK
Analisis	
Penilaian Penerapan Tata Kelola PT BPR NTB (Perseroda) untuk periode penilaian akhir Desember 2023 jika dilihat dari sisi struktur dan infrastruktur sedang berjalan dan sebagian besar sudah terpenuhi, namun masih terdapat kekurangan terkait dengan : 1. Direksi telah meninjau lanjut temuan OJK namun belum secara keseluruhan. 2. BPR telah memiliki 3 orang Dewan Komisaris yang diantaranya 1 (satu) orang merupakan Komisaris Independen atau kurang dari 50% dari jumlah Anggota Dewan Komisaris. Hal ini disebabkan karena salah satu Anggota Komisaris Independen telah meninggal dunia dan belum ada penggantinya. 3. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan review atau penyempurnaan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR namun belum menyeluruh. 4. BPR belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan dan BPR belum memiliki SOP Audit Intern. 5. BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko namun BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. 6. BPR belum mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK.	

Demikian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT BPR NTB (Perseroda) untuk periode 31 Desember 2023 kami susun dan laporan ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya penerapan Tata Kelola bagi PT BPR NTB (Perseroda). Kami sadari bahwa pada tahun 2023 masih banyak kekurangan serta kelemahan yang akan kami perbaiki pada tahun 2024 ini untuk dapat melaksanakan penerapan Tata Kelola secara maksimal.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mataram, 30 Januari 2024

PT. BPR NTB (Perseroda)

Komisaris Utama



Lalu Nofian Hadif Saputra

Direktur Utama



Ketut Suharmana